

STRATEGI PENGAMANAN POLRI PERDAMAIAAN DI SERAMBI

UNTUK mengakhiri konflik di Aceh yang telah berlangsung kurang lebih 30 tahun dan telah memakan banyak korban baik dari pihak TNI/POLRI maupun masyarakat sipil, maka Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka telah mengadakan kesepakatan yang dikenal dengan nama Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pada Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tertulis dengan jelas segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar konflik di Aceh segera berakhir dan perdamaian dapat diwujudkan. Agar pelaksanaan implementasi Nota kesepahaman itu dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah RI telah mengundang negara-negara Uni Eropa sebagai pemantau untuk datang ke Aceh. Para pemantau ini semuanya tergabung dalam organisasi Aceh Monitoring Mission (AMM).

Untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas AMM, Pemerintah RI membentuk pula Perwakilan Pemerintah RI untuk AMM. Guna menjamin suksesnya pelaksanaan tugas AMM maka mereka dijamin keselamatan serta keamanannya oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengamanan AMM dan Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian untuk memperlancar jalur komunikasi dengan Pemerintah Daerah, aparat militer dan Kepolisian setempat dibentuklah Perwakilan Pemerintah RI yang diwakili perwakilan dari beberapa Institusi termasuk perwakilan dari Mabes Polri.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bahwa propinsi diujung barat Indonesia tersebut selalu terjadi konflik yang berkepanjangan tidak pernah selesai sejak jaman Belanda, Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan terutama dalam kurun waktu 30 tahun belakangan ini sejak tanggal 4 Desember 1976. Perumusan masalah dan persoalan

Terjadinya gerakan separatisme yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976 yang di deklarasikan oleh Hasan Tiro, persoalannya diawali



dengan perasaan rakyat Aceh yang mengatakan tidak adanya keadilan di bumi Serambi Mekah tersebut, yang kemudian oleh GAM dicetuskan dalam bentuk perlawanan sebagai upaya untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMECAHAN MASALAH

Pemerintah RI berulang kali mencoba mengatasi masalah di Aceh dengan berbagai upaya dari pendekatan keamanan dengan upaya represif yang selalu gagal (masa Darurat Militer dan Darurat Sipil), perundingan "setengah hati" (CoHA) yang juga gagal, akhirnya melalui perundingan yang di fasilitasi oleh CMI (Crisis Management Initiative) yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari maka tercapailah kesepakatan damai antara Pemri dengan GAM kemudian dituangkan dalam bentuk MoU yang ditandatangani di Helsinki tanggal 15 agustus 2005, kemudian untuk pelaksanaannya dimonitor oleh Aceh Monitoring Mission (AMM)

PEMAHAMAN TENTANG TUGAS AMM

AMM atau Aceh Monitoring Mission diundang oleh Pemerintah RI guna memonitor proses perdamaian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. AMM terdiri dari

DALAM PROSES MEKKAH

Oleh Kombes Pol Drs. ARIEF WICAKSONO SU*



10 negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa dan 5 negara ASEAN, mereka mempunyai tugas memonitor sebagai berikut :

1. Demobilisasi GAM dan Decommissioning persenjataan.

Berdasarkan MoU Helsinki jumlah senjata GAM yang harus dimusnahkan sebanyak 840 pucuk, pelaksanaannya dibagi dalam 4 tahap, yaitu setiap tanggal 15 dari bulan September s/d Desember 2005, kemudian setiap tahap tersebut masih dibagi lagi menjadi 3 fase, tergantung dari kesepakatan teknis penyerahan dan pemusnahan senjata yang dibicarakan dalam rapat komisi keamanan melibatkan perwakilan pihak GAM, Pemri (Pemda Aceh, Polri & TNI) dengan ditengahi oleh AMM.

2. Relokasi TNI / Polri Non organik serta Verifikasi TNI/ Polri organik. Penarikan pasukan TNI & Polri dibagi juga dalam 4 tahap disesuaikan dengan jumlah senjata GAM yang telah dimusnahkan, setiap tahapan maka 25% personel TNI dan Polri non organik kembali ke kesatuannya.

3. Reintegrasi setiap orang yang terlibat dalam GAM ke masyarakat.

Re integrasi GAM kemasyarakat merupakan tahapan yang complicated karena dilaksanakan sejak tanggal ditanda tangannya MoU Helsinki, secara terukur / kuantitas dapat dilihat dari dikeluarkannya Keputusan Presiden RI no 20 tahun 2005 yang memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi terhadap mereka yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan terpidana baik yang berada diluar negeri maupun dalam negeri. Kemudian disusul dengan tambahan sejumlah 116 orang yang hanya sebagian saja telah diberikan amnesti. Dalam pelaksanaan selanjutnya dibentuk 3 badan sebagai berikut :

a. Forum Bersama Pendukung Perdamaian Aceh (Forbes).

Forbes sendiri lebih lengkap komponennya, karena ada berbagai unsur yang mewakili di dalamnya seperti wakil dari Pemerintah RI, wakil dari Negara Donor, wakil GAM, wakil dari tokoh masyarakat dan LSM.

1) Memberikan masukan kepada Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh untuk kelancaran penyusunan, implementasi dan sinergi program reintegrasi-damai;

2) Mengoptimalkan dukungan dari berbagai pihak kepada Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh bagi terwujudnya secara efektif perdamaian di Aceh sesuai Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah RI dan GAM;

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reintegrasi-damai;

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi NAD berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Forum Bersama pendukung perdamaian Aceh.

b. Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh bertugas

1) Menyusun Strategi, Kebijakan, Program dan Prosedur Kerja Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh

bidang Ekonomi; bidang Sosial dan Budaya dan bidang Data, Monitoring dan Eyaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Menyusun program aksi dan melaksanakan program reintegrasi-damai Aceh untuk mantan pasukan GAM dan anggota GAM non pasukan;

3) Menyusun program aksi program reintegrasi-damai Aceh untuk tapol dan napol yang telah mendapat amnesti/abolisi, anggota GAM yang telah habis masa tahanan/menyerah sebelum penandatanganan MoU Helsinki, dan para Korban Konflik sebagai pedoman bagi instansi terkait yang akan melaksanakan program reintegrasi damai Aceh;

4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Pemerintah terkait dalam rangka melaksanakan program reintegrasi damai Aceh;

5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan program reintegrasi damai Aceh;

c. Badan Pengawas Reintegrasi Damai Aceh.

- 1) Melakukan pengawasan terhadap aspek keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh;
- 2) Memberikan laporan dan/atau hasil pengawasan kepada Gubernur Provinsi NAD;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Prov NAD berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Reintegrasi Damai Aceh.

4. Kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini AMM sebagai komunitas internasional yang diundang oleh Pemri untuk memonitor jalannya perdamaian akan memonitoring kasus, peristiwa yang melibatkan TNI, Polri dan GAM apabila ada unsur pelanggaran HAM maka hal tersebut diangkat untuk dibicarakan dalam forum Komisi keamanan, tetapi sepanjang itu menyangkut masalah kriminal maka akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
5. Proses pembuatan Perundang-undangan.

Proses pembuatan Undang – Undang Pemerintahan Aceh diawali dari penyusunan ditingkat kelompok kerja masyarakat Aceh itu sendiri sampai dengan dibahas di DPR RI dan di sahkannya menjadi UPUA No 11 Tahun 2006 serta kemudian berdasarkan itu dibuatlah Qanun / Peraturan daerah guna diadakannya pemilihan kepala pemerintahan Aceh. Berdasarkan pasal 5.8 yang mengatakan bahwa pengamanan personel Aceh Monitoring Mission dijamin oleh Pemri yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk memperlancar hubungan kerja dengan Kepolisian setempat maka Mabes Polri menugaskan Perwakilan Polri guna membantu melancarkan mekanisme kerja dengan Polda NAD. Strategi Polri dalam pengamanan proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam dibagi menjadi 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. BHAKTI - DHARMA

Pertama, Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Pengamanan AMM, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengamanan melekat terhadap personel AMM. (Close protection)
2. Penjagaan markas atau Kantor AMM. (Static Guard)
3. Pengawasan terhadap aktivitas personel AMM (Police Escort)

Kedua, Polda NAD melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam paska penanda tangnan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Pendekatan yang digunakan adalah menjadikan masyarakat sebagai Mitra, persuasif serta melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan terukur. Ketiga, Mabes Polri menunjuk perwakilannya untuk duduk di Perwakilan Pemerintah RI untuk AMM yang berkedudukan di Banda Aceh dengan tugas:

1. Menjembatani komunikasi, kepentingan Perwakilan Pemri maupun AMM dengan

Satgas PAM AMM dan Polda NAD.

2. Mengemban tugas Diplomasi apabila ada permasalahan yang melibatkan pihak GAM dengan Kepolisian setempat dengan berdasarkan prinsip profesionalisme, proporsional dan dengan tidak mengorbankan kepentingan Polri itu sendiri.
3. Melaksanakan fact finding secara terbatas berkoordinasi dengan Polda NAD maupun Satgas PAM AMM secara profesional dan proporsional.

PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN AMM

Satgas Pam AMM, melaksanakan pengamanan personel AMM di 10 distrik, Banda Aceh, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Tapak Tuan, Kuta Cane, Langsa, Meulaboh, Blang Pidie dan Lamno serta Kantor Pusat AMM yang berdomisili di Universitas Syah Kuala, Darussalam Banda Aceh. Seperti telah disinggung diatas bahwa pengamanan ada yang bersifat terbuka dengan penempatan Uniform Police yang melaksanakan penjagaan di 10 Kantor Distrik AMM dan Kantor Pusat AMM, kemudian melaksanakan pengamanan melekat (Close Protection) terhadap pejabat AMM seperti terhadap Ketua AMM, kedua Deputi, Kepala Staf dan pengamanan melekat lainnya apabila diminta. Disamping itu melaksanakan pengawalan terhadap personel AMM yang melaksanakan perjalanan dari titik ke titik, apabila mereka tidak mau dikawal harus memberikan pernyataan secara tertulis. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan lancar, namun pada awalnya masih banyak kecurigaan terhadap personel Polri oleh AMM dikarenakan mereka ragu bahwa kegiatan mereka terutama apabila bertemu dengan GAM dimata – matai, tetapi setelah diberi penjelasan bahwa tugas Polri tidak lain dan tidak bukan demi keamanan semata dan itu dibuktikan dengan penampilan anggota Satgas yang profesional, maka seiring dengan berjalannya waktu keraguan itu semakin menipis, sehingga akhirnya dapat terjalin hubungan yang harmonis antara personel AMM dengan petugas dari Satgas Pam.

2. Polda NAD, melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab keamanan wilayah secara profesional di 21 wilayah Kepolisian Resort termasuk di Pulau Sabang dan Simeuleu (Sinabang). Terkadang operasi Kepolisian rutin yang dilaksanakan mengundang keraguan dari pihak GAM yang belum sepenuhnya turun gunung, sehingga terkadang terjadi insiden kecil akibat salah pengertian, namun setelah diberikan pengertian melalui perwakilan GAM dan AMM maka kesalah pahaman tersebut dapat diminimalisir.

Sehubungan dengan implementasi salah satu butir dalam MoU Helsinki yang amanatkan pelatihan HAM terhadap personel Polda NAD, telah dapat dilaksanakan secara bertahap baik itu terhadap Pejabat Utama Polda NAD termasuk terhadap para Kapolres, Kapolsek, dilaksanakan juga pelatihan HAM terhadap 6000 personel Polda NAD termasuk materi didalamnya adalah bagaimana menghadapi pengamanan Pilkada Aceh.

Polda NAD dalam melaksanakan tugas Kepolisian

agak terkendala dengan minimnya jumlah personel yang diperbolehkan paska MoU Helsinki yaitu hanya 9100 orang, ini agak menyulitkan terutama saat melaksanakan pengamanan Pilkada desember 2006, namun akhirnya berkat koordinasi yang baik dan dibicarakan dalam rapat Komisi Keamanan yang dilaksanakan antara Perwakilan Pemri, GAM dan AMM disetujui jumlah sejumlah 2433 orang Bintara magang untuk dilibatkan dalam pengamanan tersebut, untuk

selanjutnya jumlah Polisi akan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh terpilih.

3. Perwakilan Polri di Perwakilan Pemri untuk AMM, mengemban misi menjembatani komunikasi dan diplomasi antara AMM, GAM dengan Satgas Pam AMM, Polda NAD, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut mengacu kepada semangat dari MoU Helsinki itu sendiri, mengutamakan Imparsial, kesetaraan, bermartabat, menghargai Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, juga merujuk kepada tugas dan peran Polri secara profesional dan proporsional.

Dalam melaksanakan Strategi Polri guna mengamankan proses perdamaian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka Strategi Polri yaitu Polisi Mitra Masyarakat sangatlah tepat, karena karakteristik dan kultur masyarakat Aceh sendiri sudah bosan dengan janji – janji pemerintah pusat, sehingga dengan Polri mengajak bermitra kepada masyarakat Aceh maka secara perlahan tetapi pasti mereka memberikan respons yang positif, sepanjang petugas Polri dapat menampilkan sikap yang profesional, proporsional, santun dan tidak arogan maka banyak mendapatkan simpati, sehingga dengan demikian masyarakat Aceh dapat memberikan partisipasinya guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Hal tersebut adalah penting mengingat upaya perdamaian yang telah diupayakan beberapa waktu yang lalu selalu gagal diawali dengan terjadinya insiden / perselisihan dilapangan, oleh karenanya perlu diambil keputusan bersama para pihak dengan prosedur sebagai berikut :

Prosedur Pengambilan Keputusan Bersama

- 1) Bila terjadi insiden antara TNI / Polri dan GAM, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menarik mundur pasukannya.
- 2) Jika terjadi insiden antara TNI / Polri dan GAM maka AMM di tingkat District Office dapat melaksanakan penyelidikan dengan melibatkan Perwakilan GAM dan Perwakilan Polri di tingkat Kabupaten.

Jika terjadi insiden yang dapat mengakibatkan gagalnya MoU, kedua belah pihak segera melaporkannya kepada AMM. Selanjutnya AMM dapat mengirimkan Tim dari Komisi Keamanan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mengumpulkan data dan fakta tentang insiden tersebut dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden. Dengan mengetahui penyebab insiden tersebut diharapkan di masa yang akan datang insiden serupa tidak akan

terjadi lagi.

Jenis insiden yang dikategorikan dapat mengakibatkan gagalnya MoU akan dibahas lebih lanjut oleh Working Group. AMM, Pemri dan GAM sepakat untuk tidak menyampaikan pendapat dan pernyataan tentang suatu insiden kepada Media Massa yang dapat memperkeruh situasi.

KESIMPULAN :

Bahwasanya selama dalam proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bentuk implementasi MoU Helsinki, AMM (Aceh Monitoring Mission) telah menjalankan perannya dengan sangat baik. dimana semua itu tidak terlepas dari strategi Polri yang telah dijalankan dengan prima. Dalam melaksanakan tugas dan peran apakah itu sebagai Satuan Tugas Pengamanan Personel AMM, Perwakilan Polri yang menjembatani kepentingan / komunikasi antara AMM dengan Polda NAD maupun pelaksanaan pengamanan kamtibmas oleh Polda NAD itu sendiri telah berhasil dengan baik. Semuanya itu berkat strategi Polri yang mengajak masyarakat Aceh sebagai mitra, namun tetap melaksanakan tugasnya dengan profesional, proporsional serta penegakan hukum yang terukur. Keberhasilan tugas Polri tersebut seperti yang telah di amanatkan dalam MoU Helsinki dapat mengamankan beberapa agenda penting dalam proses perdamaian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari tugas pengamanan pemusnahan senjata GAM, proses Re-Integrasi sampai dengan pengamanan Pilkada Aceh yang menjadi pantauan dunia Internasional, padahal Polda NAD dan jajaran baru saja dalam proses recovery paska bencana Tsunami, tugas besar tersebut patut mendapatkan Apresiasi secara Nasional dan bahkan dari dunia Internasional.

REKOMENDASI

Ke depan guna memelihara situasi kamtibmas yang telah kondusif maka Polda NAD dengan dukungan dari Mabes Polri dapat melanjutkan tugas dengan lebih beradaptasi dengan nilai – nilai demokratisasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berwawasan terbuka dengan lingkungan hidup disamping komunitas internasional.

Kemudian diharapkan Polda NAD dapat berkoordinasi dengan Gubernur Aceh terpilih dalam mengemban tujuan memajukan dan mengembangkan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bingkai/bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia .

* Penulis bertugas di Aceh periode 17 Agustus 2005 s/d 10 Januari 2006 sebagai Waka Ops Pam AMM, 18 Agustus 2005 s/d 30 Desember 2006 sebagai Perwakilan Polri untuk AMM

CHRISJON, PERTAHANKAN GELAR KELAS BULU WBA

Chrisjon, juara tinju kelas bulu dunia versi WBA berhasil mempertahankan sabuk juaranya, sejak 2003. Petinju kebanggaan Indonesia bernama lengkap Christian Johannes, itu mengalahkan Jose Rojas (Venezuele) dengan kemenangan angka mutlak (3/3/07).

CHRISJON, kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah, 14 September 1979, telah membuktikan bahwa dialah yang terbaik di tinju kelas bulu dunia versi WBA. Chrisjon telah mengalahkan nama besar para penantang.

Pertama mengalahkan Osamu Sato (Jepang). Kedua mengalahkan Jose Rojas (Venezuele). Disusul, ketiga, menaklukkan Derrick Gainer (AS), mantan juara dunia WBA yang lebih diunggulkan tapi ditaklukkan pada 22 Desember 2004. Keempat, membungkam Tommy Browne (Australia). Kelima, mengubur mimpi Juan Manuel Marquez (Meksiko). Keenam, menghempaskan Renant Acosta (Panama). Dan Ketujuh, kembali mengalahkan Jose Rojas (Venezuele).

Dalam pertarungan dengan Rojas di Jakarta, 3 Maret lalu, penantang peringkat satu IBF itu disebut orang lebih kuat dan lebih cepat, tetapi ternyata Chrisjon lebih cerdas dan tak kalah cepat. Kecerdikan Chrisjon membuat Rojas tak berdaya dan harus mengubur impiannya merebut sabuk juara tinju kelas bulu dunia versi WBA. Meskipun pelepis kiri Chrisjon mendapatkan

enam jahitan, namun luka ini tidak mempengaruhi petinju asal Banjarnegara tersebut untuk merebut gelar juara.

Sebelum pertandingan tersebut, suami Ana Maria Megawati ini sempat terganggu konsentrasinya sebelum bertanding. Pasalnya, bayarnya belum dilunasi oleh promoter Albert Reinhard Papilaya. Chrisjon memang mendominasi pertandingan, dalam partai yang dipimpin oleh Derek Millham dari Australia ini, Tiga hakim memberikan kemenangan untuknya. Frank Martinez dari Selandia Baru memberinya angka 118-108. Uriel Aquicera Vero (Kolombia) 117-107. Sedangkan Levi Martinez (AS) 116-110.

Perjuangan Chrisjon dalam memperoleh gelar juara dunia bukanlah hal yang mudah. Sebelum mengalahkan Marquez pada tahun lalu, para pemerhati tinju dunia memandang Chrisjon dengan sebelah mata. Mereka menyebut, gelar juara dunia tinju yang dia sandang bukan hasil kerja keras. Chrisjon merebut gelar juara dunia hanyalah sebagai kado, titipan dari Marquez (juara dunia IBF) yang menundukkan Derrick Gainer (juara dunia WBA) dalam partai unifikasi gelar yang tidak disetujui WBA pada 1 November 2003. Kekalahan Gainer itu membuat sabuknya dicopot dan diserahkan kepada Chrisjon yang menjadi juara ad interim setelah mengalahkan Oscar Leon di Bali, September 2003. Kemenangan Chrisjon atas Marquez pada tahun 2006 lalu, membuktikan bahwa sabuk juara dunia yang dia terima bukan lagi titipan, tetapi hak yang diperoleh dari perjuangan.

Harus diakui penampilan Chrisjon jauh berkembang setelah lepas

dari tangan pelatih tinju Sutan Raming. Di tangan pelatih asal Australia, Craig Christian, Chrisjon menjadi garang sekaligus dingin dan cerdas. Pukulannya memang belum terlalu kuat, tetapi dia lebih percaya diri, cerdas dan pukulannya selalu mengenai sasaran.

Hanya saja, kubu Christian, terutama pelatih Bob Pidonovski, tampak terlalu memproteksi Chrisjon dari media, sehingga promosinya menjadi sangat lemah. Akibat-



nya, secara langsung dan tidak langsung, bayaran Chrisjon hanya 131.000 dollar AS saat melawan Juan Manuel Marquez yang notabene merupakan salah satu petinju terbaik dunia. Kini, bayaran Chrisjon mencapai 200 ribu dolar AS, sebuah jumlah yang cukup besar untuk Chrisjon.

PETINJU TERKAYA

Dengan bayaran tersebut Chrisjon kini merupakan petinju terkaya setelah Elias Pical, juara dunia kelas bantam yunior (55,3 kg) International Boxing Federation (IBF) 1985-1989, terbilang petinju terkaya. Ia telah bertanding 11 kali dalam perebutan gelar dunia, dan tiga kali meraih gelar dunia IBF.

Ia meraih gelar IBF dengan meng-KO Ju Do-chun (Korsel) ronde ke-8 pada 3 Mei 1985. Kemudian secara

beruntun Pical bertarung di kejuaraan dunia, melawan Wayne Mulholland (Australia), Cesar Polanco (Puerto Rico), Lee Dong-chung (Korsel), Khaosai Galaxy (Thailand), Tae Il-chang (Korsel), Raul Diaz (Kolumbia), Ki Chang-kim (Korsel), Mike Phelps (AS), dan Juan Polo Perez (Kolumbia).

Promotor Boy Bolang memberikan honor tinggi 100.000 dolar AS untuk setiap kali Pical duel. Bahkan lawan Galaxy di unifikasi gelar IBF dan WBA, Bolang lebih "gila" lagi dengan memberi honor mantan juara Piala Presiden ini 150.000 dolar AS.

Jika dihitung, kekayaan Pical mencapai 900 ribu dolar AS (kurs sekarang sekitar Rp 8 miliar). Dia merupakan petinju terkaya Indonesia, jauh lebih kaya dibanding Chrisjon. Namun sayang, Pical tak

bisa mengelola uang dengan baik sehingga bangkrut pada hari tuanya. Terakhir, petinju itu bahkan bekerja sebagai tenaga keamanan (satpam).

Berbeda dengan Pical, Chrisjon yang lebih muda memiliki bayaran yang setara dengan Pical, hanya saja ia masih jauh kalah dalam jumlah pertandingan yang dijalani. Dari tujuh kali pertandingan perebutan gelar juarta dunia, kini, total kekayaan Chrisjon mencapai 800.00 dolar AS (sekitar 7 miliar).

CEK KOSONG

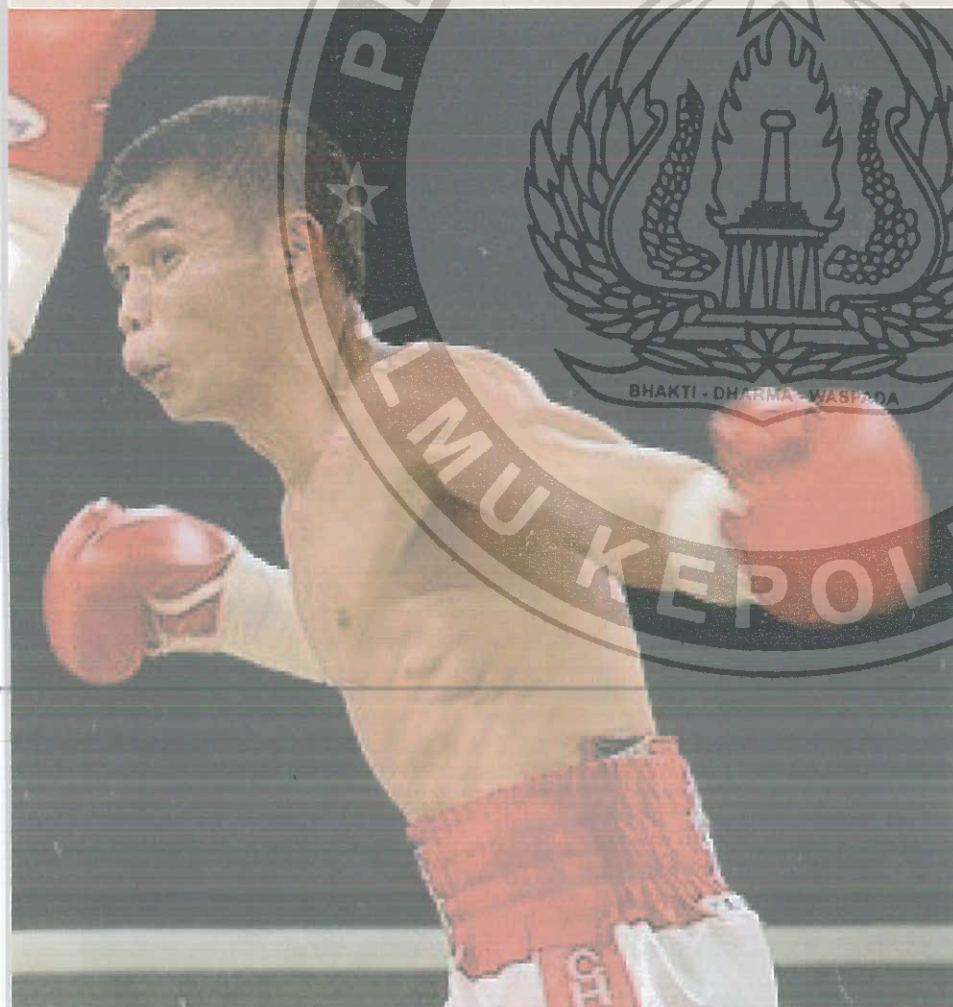
Namun sehari setelah pertandingan Crisjon melarwan Rojas (3/3/07), Dunia tinju profesional Indonesia tercoreng karena kontrak pertarungan tersebut ternyata dibayar dengan cek kosong oleh promotor Albert Papiilaya.

Dalam jumpa pers di Hotel Sahid Jakarta, Senin, Chrisjon yang didampingi pelatihnya Craig Cristian asal Australia itu menyatakan kegeramannya karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Albert Papiilaya selaku promotor. Yang lebih memalukan, yang ditipu karena dibayar dengan cek kosong tersebut bukan hanya Chrisjon, tapi juga Jose Rojas dan bahkan petinju lain yang tampil di partai tambahan.

"Ini jelas mencoreng nama Indonesia, terutama di mata komunitas tinju internasional. Saya tidak tahu apakah nantinya masih ada petinju luar yang mau bertanding di Indonesia," kata Chrisjon yang pelipis kirinya masih dibalut perban akibat pukulan Rojas.

Masalah tersebut dipastikan akan melebar dan bisa merusak citra Indonesia karena kedutaan Venezuela di Jakarta diberitakan terpaksa turun tangan dengan menalangi jumlah yang belum diterima Rojas.

Rojas baru menerima sebesar 10.000 dolar AS sebagai uang muka dari total 45.000 dolar yang harus diterimanya. Sebelum berangkat kembali ke Venezuela, Rojas memperlihatkan cek sebesar Rp 360.000.000 sisa bayaran yang ternyata tidak bisa dicairkan.[aR]



WAJAH SEBUAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN

JEAN Claude Van Damme berjalan tegap dengan tangan diborgol. Irama langkahnya terdengar tak beraturan, menyerupai bunyi benda diseret. Karuan saja, soalnya kedua kakinya terikat rantai. Petugas yang mengawalnya segera mendotrong tubuhnya ke dalam ruangan berterafi ukuran 2x2 meter. Buk! Tubuhnya yang berat terjatuh ke lantai yang dingin. Mencoba bangun, namun tiba-tiba sepasang kaki menyambar wajahnya. Darah pun mengucur deras menghiasi kostum birunya.

Itulah potongan cerita film Amerika yang menggambarkan kekejaman di sebuah penjara Amerika yang dibintangi Jean Claude Van Damme. Aktor ganteng yang memerankan tokoh polisi itu sedang menyamar jadi napi untuk menyelidiki kasus brutalisme yang terjadi di penjara. Perlakuan buruk pun dialaminya. Mulai dari penganiayaan hingga pelecehan seksual. Baik oleh sesama napi maupun petugas penjara. Setelah penyamarannya terbongkar, perlakuan terhadap dirinya smakin buruk.

Seperti sering kita lihat, film-film Hollywood memang banyak menggambarkan betapa sengsara dan menderitanya seorang polisi yang masuk penjara. Dia kan jadi bulan-bulanan sesama napi dan menjadi sasaran empuk balas dendam. Penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum, hukumannya harus lebih berat. Begitu logika umumnya.

Mungkin logika itu pula yang coba dijadikan pegangan Kapori Jenderal Sutanto ketika memilih memenjarakan Suyitno Landung di tahanan Brimob Kelapa Dua ketimbang penjara Cipinang seperti asumsi beberapa pemerhati masalah hukum yang menyangkut kasus Suyitno Landung. Benarkah begitu, mungkin ya mungkin juga

tidak.

Gambaran di atas bisa jadi mewakili potret buram apa yang disebut dengan penjara di pelosok dunia manapun, termasuk di Indonesia. Dalam sebuah obrolan, seorang rekan wartawan yang tetangganya pernah masuk penjara menceritakan betapa menyramkan kehidupannya di balik terali, terutama bagi yang lemah dan tidak berdaya apapun. Artinya lemah fisik dan lemah ekonominya. Di dalam penjara, katanya, apa yang disebut hukum rimba memang benar apa adanya. Siapa kuat dialah yang keluar sebagai pemenangnya. Riset untuk itu mungkin memang belum ada namun itulah pengalaman yang sering kita dengar dari mereka-mereka yang pernah masuk di dalamnya.

Kejadian ini mungkin pernah kita tonton di film atau sinetron-sinetron kita. Tapi menurut Eko, napi yang baru saja sebulan menjalani hukumannya di Cipinang karena kasus pencurian - mengaku cerita tersebut benar adanya. Hari perta-

ma masuk Cipinang, dia diplonco habis-habisan oleh senior-seniornya. Kalau sekedar "bogem mentah" di wajah itu biasa. Tapi dia pernah merasakan asinnya air kencing seniornya sebagai hukuman karena dianggap melawan senior. "Saya disuruh mijit badannya yang besar sampai berjam-jam. Karena capek saya tertidur. Saat itulah dia marah," ucap Eko yang bersumpah kapok masuk penjara.

Din, lain lagi. Perempaan paruh baya yang menghuni Rutan Wanita Pondok Bambu ini pernah dipaksa melayani nafsu birahi "kakak" sekamarnya yang ternyata suka berhubungan dengan sesama jenis. "Ih najis rasanya. Untung dia sekarang sudah bebas," kata Dien yang dihukum 5 bulan karena ketahuan "ngutil" di sejumlah swalayan.

LAIN Cipinang lain Salemba. Meski keduanya sama-sama penjara, namun kalau boleh memilih, orang akan menghindari dari penjara Cipinang. Begitu konon kabarnya. Ma-



ka setiap kali terjadi perputaran bagi napi, mereka berharap tidak dipindahkan ke Cipinang. Bukan berarti di Rutan Salemba dijamin tidak akan mengalami kekerasan, tapi dibanding Cipinang Salemba masih jauh lebih nyaman. "Tapi senyaman-nyamannya penjara ya enak di rumah lah..." cetus Jar, yang dijebloskan penjara karena terlibat utang piutang dengan kakak iparnya.

Pri, seorang tersangka kasus narkoba yang kini menghuni Rutan Salemba bercerita, dirinya was-was karena namanya termasuk dalam daftar napi yang segera akan dipindah ke Cipinang. Tak ada yang bisa diperbuatnya untuk mengubah keputusan itu, kecuali menyeter sejumlah uang yang cukup besar kepada pejabat Rutan Salemba. "Sepertinya saya nggak sanggup mba-yar jadi pasrah saja," tukasnya.

Sementara Ony, yang divonis 2 tahun karena kedapatan membawa sabu-sabu justru mengaku tidak terlalu khawatir karena dia sudah siap dana untuk membiayai hidupnya selama menghuni Lapas Cipinang. Kekasih gelap seorang artis papan atas Indonesia ini menempati blok khusus bersama orang-orang berduit. "Gue satu ruang dengan mata sipit," cetus Ony yang memang tak punya masalah dengan keamanan dirinya karena kekasihnya selalu membawa uang cukup untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan, di antaranya memilih blok yang "aman" dari jamahan sesama napi.

Rasa aman memang harus dibeli dengan harga mahal. Ti, kekasih Ony yang berhasil ditemui mengatakan sekali bezuk dia menghabiskan uang tak kurang dari 500 ribu rupiah. Uang itu dipakai untuk melicinkan "perjalanannya" bertemu sang kekasih, biaya pengamanan, dan uang tutup mulut agar "keartisannya" tidak diketahui orang. Asal tahu saja, untuk menutupi jati dirinya Ti selalu mengenakan kerudung dan cadar setiap kali berkunjung ke Cipinang. Dengan uang itu pula Ti bisa berlama-lama karena jam bezuknya diperpanjang. Mau "tidur"? Bisa juga karena di sana juga tersedia ruangan khusus dengan tarif bervariasi setiap

jamnya. Mulai dari yang termurah Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.

SECARA umum, seperti dikatakan Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, ada tiga jenis aksi kekerasan yang terjadi di lapas. *Pertama*, kekerasan individual; *kedua*, kekerasan kolektif; *ketiga*, kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan.

Kekerasan individual biasanya terjadi di antara napi atau dengan salah seorang sipir penjara. Sedangkan kekerasan kolektif sering terjadi dalam masalah *riot* (kerusuhan, huru-hara dan keributan). Biasanya kekerasan seperti ini terjadi secara spontan, sebagai bentuk dari akumulasi persoalan yang dialami para napi di penjara.



Khusus mengenai kekerasan yang berhubungan dengan peraturan, terjadi karena adanya perselisihan antara petugas dan napi akibat hubungan yang tidak sehat. Ketika napi dihukum karena melakukan pelanggaran, tetapi hukuman tersebut dipahaminya sebagai bentuk sebuah penyesalan. Maka muncullah hubungan tak sehat antara keduanya dan dendam.

Faktor lainnya yang sering juga memicu terjadinya aksi kekerasan adalah daya tampung Lapas yang terbatas. Dan inilah yang terjadi di Lapas Cipinang yang hanya memiliki daya tampung 1.700 orang sementara penghuninya ada lebih dari 2300 napi. Dengan penghuni sebanyak itu Lapas Cipinang hanya memiliki 40 orang petugas sekali jaga. Mana mungkin mereka sanggup?

PERBEDAAN PERLAKUAN

Anton Medan, yang pernah

menghuni Lapas Cipinang bercerita, sepanjang pengamatannya, perbedaan perlakuan atau diskriminasi seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Perbedaan perlakuan terhadap napi berduit dengan yang tidak berduit sangat kentara.

Kondisi itu makin diperparah dengan sistem pembinaan yang kurang profesional dari sistem yang ada, serta kurang berfungsinya pengamatan dari hakim wasmat (pengawas pengamat). Ibarat hotel, masing-masing blok di Lapas Cipinang memiliki kelas-kelas dengan fasilitas berbeda. "Khususnya di Blok II yang banyak dihuni oleh mantan pejabat ataupun orang terkenal kondisinya jauh berbeda dengan blok lainnya," katanya.

Pendapat Anton ini serupa dengan pendapat mantan Menteri Kehakiman Muladi. Katanya, salah satu kelemahan Lapas di Indonesia adalah kurangnya petugas profesional sebagai pembina, misalnya ahli-ahli ilmu-ilmu sosial yang betul-betul terdidik dan sarjana.

Walaupun ada perkembangan baru dengan UU Pemasyarakatan petugas lapas mendapat tunjangan fungsional, akan lebih baik kalau lapas bisa menarik sarjana ilmu sosial untuk membina, misalnya psikolog, antropolog atau psikiater dan sebagainya. Berkurangnya hak-hak kebutuhan dasar individual para napi tersebut akan semakin jauh dari ideal, tak terpenuhi, bahkan terabaikan. Karenanya, penataan kembali manajemen penjara adalah keniscayaan.

Sementara Kepala Lapas Cipinang, Gunadi mengatakan "Tidak ada diskriminasi dalam penempatan napi. Selain itu, sejak diberlakukan sistem keamanan dan pengawasan yang lebih ketat, tidak terjadi lagi tawuran di lapas yang dipimpinnya. Berbagai upaya untuk membina napi pun dilakukan termasuk dengan pendekatan keagamaan dan pendidikan keterampilan," ujarnya.

Jika ketiga hal itu dibiarkan begitu saja, keberadaan lapas akan tetap seperti yang dikenal orang selama ini, "tempat bertemunya penjahat sekaligus bersemayamnya kejahatan baru yang sarat dengan kekerasan". [cil]

TERBAKAR DI LAUT, TERBAKAR PULA DI UDARA

"21 Penumpang Pesawat Garuda Terbakar". Itulah *headline* berita yang terpampang di halaman satu sebuah surat kabar ibukota yang terbit Rabu (7/3). Judul berita yang tertulis dengan huruf besar-besar tersebut seolah menyempurnakan penderitaan bangsa Indonesia yang tiada henti diterpa bencana dan musibah.

Bagaimana tidak. Kebakaran yang menimpa pesawat Garuda tersebut merupakan musibah ketiga yang terjadi selama lima hari terakhir di minggu pertama bulan Maret. Sebelumnya longsor di Mangarai, Sabtu (3/3), yang mengakibatkan 50 orang lebih meninggal dan gempa di Sumatera Barat Selasa (6/3) yang menewaskan setidaknya 70 orang.

Padahal belum lama, pada awal Februari silam, warga DKI Jakarta sudah dibuat pontang panting oleh banjir besar yang merendam lebih dari 60 persen kawasan di Jakarta. Tercatat sebanyak 80 orang meninggal terseret arus, tersengat listrik dan diserang penyakit pasca banjir seperti demam berdarah.

Terjadinya musibah secara beruntun tersebut seolah menunjukkan kemurkaan alam dan bumi terhadap manusia-manusia penghuninya. Maut seolah mengintip kita bukan hanya dari darat, udara tapi juga laut. Menyusul banjir, kapal motor penumpang Levina I yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pangkal Balam, Bangka Belitung terbakar di Selat

Sunda, Kamis pagi (22/2) sekitar pukul 05.30 WIB dan menewaskan 42 penumpangnya.

Celakanya lagi, ditengah upaya pencarian para korban terbakar-nya KMP Levina I, terjadi peristiwa tragis yang menelan korban jiwa manusia lagi di kapal yang sama. Minggu (25/2), kapal yang tengah diselidiki tim investigasi tiba-tiba tenggelam. Para anggota tim investigasi yang terdiri atas Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta rombongan wartawan yang berada di atas Levina I berloncatan untuk menyelamatkan diri.

Empat orang dari mereka tewas tenggelam yaitu kameramen Lativi Suherman (31), kameramen SCTV Muhamad Guntur Syaifullah (41),

serta dua anggota Puslabfor Mabes Polri Ajun Komisaris Besar Langgeng Widodo dan Komisaris Widyantoro.

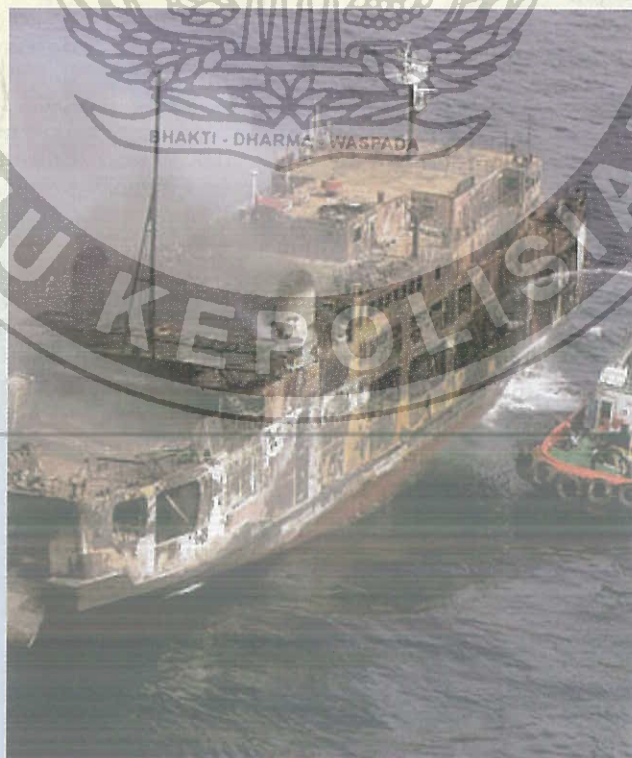
Bangka kapal itu tenggelam di perairan Muara Gembong, Bekasi, tempat kapal dilabuhkan, setelah sehari diseret dari Laut Kepulauan seribu (laut Jawa) tempat kapal itu terbakar. Begitulah yang disebut musibah dan bencana. Kapan datang tiada yang tahu. Mengapa terjadi, juga sulit dijawab. Siapa yang tahu rencana Tuhan dibalik semua itu?

Belajar dari semua kejadian itu, kita, manusia hanya perlu dan patut mengambil hikmah. Bahwa seyogyanya manusia menjadi sadar diri, mawas diri dan introspeksi diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk sesama? Bagaimana kita memperlakukan alam kita? Sudahkah kita bersiap diri sebelum maut menjemput kita? ***

TAK PERLU KAMBING HITAM

Lazimnya sebuah kejadian, tentu mengandung sebab dan akibatnya. Di tengah kesedihan keluarga yang ditinggalkan korban, pencarian bukti untuk mencari sebab terjadinya berbagai kecelakaan tersebut pun terus berlangsung.

Menurut Kabid KPLP Pandji Nirwana, berdasarkan aturan internasional, kapal yang terbakar baru aman untuk dinaiki setelah api padam sama sekali selama 3 x 24 jam. Tapi entah bagaimana ceritanya kok tim investigasi tetap nekat naik ke kapal padahal dari bagian buritan kapal masih terlihat keputihan asap.



Hal itu menunjukkan bahwa kondisi logam serta besi bodi kapal masih panas dan mudah hancur.

Dalam kondisi seperti itu, kapal masih rawan untuk diobservasi dan belum ada jaminan bangkai kapal tidak akan tenggelam. Dan memang terbukti, hanya dalam hitungan kurang dari 10 menit kapal miring 50 derajat ke arah kiri dan tenggelam bersama tim investigasi yang membawa serta sejumlah wartawan. Aturan kedua yang dilanggar, kecuali anggota Polair, tidak mengenakan jaket pelampung padahal berada di perairan.

Pendapat tersebut berseberangan dengan apa yang dikatakan Kadiv Humas Mabes Polri Irfan Pol Sisno Hadiwinoto. Katanya, tak perlu mencari kambing hitam atas tewasnya wartawan saat Levina I karam karena tanggung jawab ada di tangan wartawan itu sendiri. "Kita tidak usah mencari siapa (yang bertanggung jawab), itu panggilan tugas," kata Sisno di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (27/2).

Menurut Sisno, kondisi Levina saat dilakukan olah TKP dalam kondisi aman. "Ada yang masuk kasih isyarat itu aman. Dek-deknya memang masih panas tapi simpanan panas besi dan kayu sudah hilang. Walaupun beberapa titik masih ada, namun secara umum sudah aman.

MANAJEMEN INVESTIGASI TAK JELAS

Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, Abdullah Azwar Anas, menilai tenggelamnya KM Levina 1, Minggu (25/2), membuktikan bahwa manajemen investigasi atas penyebab kecelakaan makin tak jelas. "Ini menunjukkan manajemen investigasi atas kecelakaan, khususnya di laut, tidak jelas. Ini semua terjadi karena siapa otoritas di laut juga tidak tegas," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin pagi.

Menurut politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini, mestinya sebelum mereka menaiki kapal, ada prosedur bahwa tim awal yang memastikan, kapal dalam posisi aman.



Selain itu, harusnya ada prosedur tegas bahwa dalam setiap kapal yang merupakan obyek investigasi dan dalam keadaan yang tidak terlalu aman, siapa pun harus menggunakan pelampung atau alat keselamatan lainnya.

"Dari peristiwa ini kan, menimbulkan investigasi atas investigasi. Ini kan sangat memalukan dan sebuah kecerobohan besar," kata Anas. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini regulator sektor transportasi c.q. Departemen Perhubungan dan Polri, harus berani menyatakan diri yang paling bertanggung jawab.

"Harus ada kelapangan dada untuk menyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut kepada publik," kata Anas menegaskan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan penyelidikan terhadap dugaan penyebab terbakarnya KM Levina 1, Kamis (22/2) di Selat Sunda tetap dilanjutkan, meski kapal tersebut tenggelam pada Minggu sekitar 13.30 WIB.

Berani mengakui kesalahan memang sulit. Seperti dalam kasus banjir dimana Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan banjir yang merendam lebih dari 60 persen wilayah DKI Jakarta adalah sebuah fenomena alam yang siklusnya terjadi lima tahunan. Sebuah pernyataan yang salah, soalnya banjir terakhir di Jakarta terjadi pada tahun 2002 dan tahun 1996 yang

berarti interval pertamanya enam tahun, bukan lima tahun.

Maka pernyataan itu pun dinilai banyak pihak sebagai upaya Sutiyoso untuk lari dari tanggungjawab karena justru pada tahun-tahun tersebut 2004-2006 konsentrasi Sutiyoso terfokus pada proyek busway yang sebagian dananya diambil dari alokasi dana pemeliharaan dan pengembangan tanggul pencegahan banjir!

Setali tiga uang dengan Sutiyoso adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie yang berkomentar bahwa para korban banjir "masih dapat tertawa" dan peristiwa banjir ini hanya dibesar-besarkan media "seolah-olah dunia mau kiamat" sehingga ia dikritik para korban dan anggota DPR. Tapi seperti bunyi pepatah, "anjing menggonggong kafilah tetap berlalu".

Sementara yang terjadi dengan kecelakaan pesawat Garuda, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurnadi mengatakan penyebab kebakaran baru bisa diumumkan kepada publik tiga bulan mendatang, meskipun sempat tersiar kabar penyebab sementara kecelakaan adalah *human error*. Secara formal, katanya, menurut aturan ada tenggang waktu. Begitu draft investigasi selesai, ada waktu 60 hari untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait. "Itulah yang membuat lama," jelas Tatang. [cil]